

Pengaruh Kerja Sama Ekonomi Pakistan-Tiongkok Terhadap Sikap Pakistan dalam Kebijakan kamp Pendidikan Ulang Muslim Uighur

Savinka Putri Andini

ABSTRAK

Sejak diberlakukannya kebijakan kamp pendidikan ulang pada tahun 2014, Tiongkok semakin mendapatkan sorotan sekaligus kecaman internasional. Sejak migrasi etnis Han ke Xinjiang, penduduk asli yang beretnis Uighur harus kehilangan hak politik dan ekonominya dari pemerintah Tiongkok. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan kemiskinan dan ketegangan etnis yang mendorong terjadinya sejumlah pergolakan etnis Uighur di Xinjiang. Rangkaian demonstrasi di Xinjiang menjadi ancaman bagi pemerintah Tiongkok sehingga aksi tersebut dinilai sebagai bentuk radikalisme yang harus dibasmi. Imbasnya, Tiongkok melalui kebijakan kamp pendidikan ulang mencederai identitas Muslim dan melakukan banyak tindak kekerasan, termasuk fisik dan mental. Tindakan pemerintah Tiongkok terhadap minoritas Uighur segera mendapat kecaman keras dari pihak-pihak internasional. Meski demikian, masih banyak negara memilih abstain terkait nasib masyarakat Uighur yang sebagian besar justru merupakan negara mayoritas Muslim. Salah satu negara tersebut adalah Pakistan yang secara terang-terangan memberikan dukungan kepada Tiongkok melalui pernyataan Perdana Menteri Imran Khan. Diketahui, Pakistan telah menjalin hubungan dengan Tiongkok melalui *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC) yang berlangsung sejak tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerja sama ekonomi antara Pakistan dan Tiongkok mempengaruhi sikap politik luar negeri Pakistan terhadap isu kamp pendidikan ulang di Xinjiang. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif untuk menjelaskan keterkaitan dependensi ekonomi dengan sikap Pakistan dalam merespon isu internasional, salah satunya isu Uighur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi Pakistan-Tiongkok melalui kerangka CPEC memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan luar negeri Pakistan dalam isu Uighur. Interdependensi ekonomi yang mendalam telah membentuk pola hubungan asimetris yang menjadikan posisi Pakistan tertekan untuk bersikap pasif.

Kata Kunci: Kamp Pendidikan Ulang, CPEC, Dependensi Ekonomi, Pakistan, Tiongkok

The Implications of Pakistan-China Economic Cooperation on Pakistan's Position to the Uyghur Muslim Re-Education Camp Policy

Savinka Putri Andini

ABSTRACT

Since the implementation of the re-education camp policy in 2014, China has faced increasing international scrutiny and condemnation. The mass detention of Uyghur Muslims in Xinjiang, under the guise of combating extremism, has been widely criticized as a violation of human rights. Reports of forced labor, cultural suppression, and religious repression have led to accusations of genocide from various human rights organizations. Despite these concerns, many Muslim-majority countries have remained silent or supportive of China's actions. Pakistan, in particular, has been a notable ally. The China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), a \$60 billion infrastructure project connecting Xinjiang to Pakistan's Gwadar port, has significantly strengthened bilateral ties. Pakistan's support for China's policies in Xinjiang is evident in official statements, including a joint declaration reaffirming support for each other's core interests, including Xinjiang. This alignment is driven by economic interdependence. Pakistan views the CPEC as a vital economic lifeline, offering infrastructure development, energy projects, and access to international trade routes. In return, China seeks stability in Xinjiang and the protection of its investments in Pakistan. Consequently, Pakistan's foreign policy has been influenced by its economic ties to China, leading to a passive stance on the Uyghur issue. In conclusion, Pakistan's response to China's policies in Xinjiang reflects a complex interplay between economic interests and human rights considerations. While Pakistan's support for China may be seen as pragmatic, it raises questions about the prioritization of economic gains over the rights of ethnic minorities. This dynamic underscores the challenges in balancing national interests with international human rights standards.

Kata Kunci: *Re-Education Camp, CPEC, Economy Dependency, Pakistan, China*